



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 18 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN
DAN AKSES ARSIP DINAMIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta keamanan dalam akses arsip, perlu standarisasi sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
- b. bahwa Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menegaskan perlu sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
11. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten gunung Mas Tahun 2022 Nomor 589);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip yang dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
5. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokannya.
6. Klasifikasi keamanan arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
7. Klasifikasi akses arsip adalah katagori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
8. Pengamanan arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
9. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
10. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
11. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
12. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.

13. Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan/penyediaan arsip bagi kepentingan kegiatan pemanfaatan/penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
14. Prosedur pengaksesan informasi publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
15. Informasi yang dikecualikan adalah informasi bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.
16. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otorisasi dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam rangka melindungi fisik dan informasi arsip dari penyalahgunaan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menyediakan informasi arsip yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses bagi kepentingan publik serta menjamin keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.

Pasal 4

Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis meliputi:

- a. sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; dan
- b. pengaturan akses arsip.

BAB II

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 5

- (1) Asas klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan pengolahan arsip dinamis.

Pasal 6

- (1) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. arsip yang tercipta pada instansi pencipta dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;
 - b. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana tersebut dalam huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
 - c. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana tersebut dalam huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya; dan
 - d. publik dapat mengakses informasi yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- (2) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunak.
- (3) Perangkat keras sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa rak arsip (*filling cabinet*) arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka, dan brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia;
 - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (4) Perangkat lunak sebagaimana tersebut pada ayat (2) meliputi:
 - a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital;
 - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.
- (5) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka.
- (6) Sistem klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi bidang tugas, sebagai berikut:
 - a. 000 Umum;
 - b. 100 Pemerintahan;
 - c. 200 Politik;
 - d. 300 Keamanan dan Ketertiban ;
 - e. 400 Kesejahteraan;
 - f. 500 Perekonomian;
 - g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan ;
 - h. 700 Pengawasan;
 - i. 800 Kepegawaian; dan
 - j. 900 Keuangan.

BAB III
PENGATURAN AKSES ARSIP
Pasal 7

- (1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan kepada pengguna arsip yang berhak.
- (2) Pengguna arsip yang berhak mengakses arsip terdiri dari:
 - a. Pengguna internal yang ada di instansi; dan
 - b. Pengguna eksternal di luar instansi.

Pasal 8

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari:
 - a. penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Kepala Perangkat Daerah/instansi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 2. Pimpinan tingkat tinggi yaitu Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin; dan
 3. Pimpinan tingkat menengah yaitu Kepala Sub Bidang, Sub Bagian yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi, pimpinan level tinggi, dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
 - b. Pelaksana kebijakan yaitu staf, petugas arsip, arsiparis dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan level tinggi, pimpinan level menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin; dan
 - c. Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Publik yang berhak, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan katagori biasa / terbuka;

- b. Pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan; dan
- c. Aparat Penegak Hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

Pasal 9

Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 disusun dalam daftar arsip dinamis diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sebagai berikut:

- a. kode angka 000 bidang tugas Umum;
- b. kode angka 100 bidang tugas Pemerintahan;
- c. kode angka 200 bidang tugas Politik;
- d. kode angka 300 bidang tugas Keamanan dan Ketertiban;
- e. kode angka 400 bidang tugas kesejateran;
- f. kode angka 500 bidang tugas Perekonomian;
- g. kode angka 600 bidang tugas Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan;
- h. kode angka 700 bidang tugas Pengawasan;
- i. kode angka 800 bidang tugas Kepegawaian; dan
- j. kode angka 900 bidang tugas Keuangan.

Pasal 10

- (1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengamanan fisik dan informasi arsip.
- (2) Pengamanan fisik dan informasi arsip dalam ayat (1) secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan dan media simpan arsip.
- (3) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kategori arsip biasa/umum/terbuka disimpan pada rak besi;
 - b. kategori arsip terbatas disimpan pada rak arsip (*filling cabinet*); dan
 - c. kategori arsip rahasia dan sangat rahasia disimpan pada lemari besi.
- (4) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.
- (5) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Arsiparis dan/atau petugas kearsipan yang diberi kewenangan dan tanggung jawab mengelola dan mengamankan fisik serta informasi arsip.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 21 Februari 2022

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 21 Februari 2022

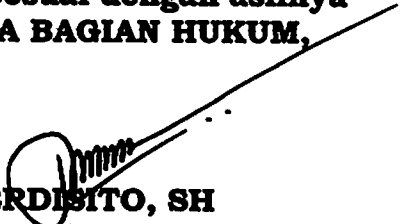
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022 NOMOR
596

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERDISITO, SH
Pembina (IV/a)

NIP. 19700617 200501 1 007

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
AKSES ARSIP DINAMIS**

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
A. UMUM (000)						
	001	Lambang, meliputi: a.Garuda b.Bendera kebangsaan c.Daerah (provinsi, kabupaten/kota) d.Bandir/umbul-umbul	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian Sekretariat pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Umum Setda
	002	Tanda kehormatan/penghargaan diberikan kepada non-PNS				
	003	Hari raya/besar, meliputi: a.Nasional (17 Agustus, Hari b.Pahlawan, dan sebagainya); c.keagamaan; dan d.Hari ulang tahun				
	004	Ucapan, meliputi: a.Terima kasih; b.Selamat; c.Mohon diri; dan d.Belasungkawa, dan lainnya.				

005	Undangan Laporan kegiatan Pembuatan undangan beserta distribusinya				
006	Tanda jabatan Pamong Praja Pejabat lainnya				
010	<p>Urusan dalam, meliputi:</p> <p>a.gedung kantor termasuk instalasi (listrik, telepon, otomasi/internet, air <i>minuet, hydrant, alarm, drainage</i>);</p> <p>b.rumah dinas, persinggahan (mess/wisma/hotel), rumah susun;</p> <p>c.peminjaman sarana prasarana kantor (ruangan, gedung, kendaraan, LCD, Laptop, dll.);</p> <p>d. pengurusan kendaraan dinas;</p> <p>e. keamanan/ketertiban kantor;</p> <p>f. perjanjian kerja sama, MoU Pemda dengan instansi pemerintah/swasta;</p> <p>g.laporan kegiatan pelaksanaan peringatan kenegaraan dan hari-hari besar keagamaan;</p> <p>h. kebersihan kantor;</p> <p>i. protokol</p> <ul style="list-style-type: none"> -upacara bendera -tata tempat -pemasangan kepala negara/daerah, -audensi, -penerimaan tamu <p>j. kerja sama.</p>	Biasa/Tebuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	<p>1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian Sekretariat pada masing-masing Perangkat Daerah;</p> <p>2. Bagian Sekretariat pada Bagian Umum Setda</p>

020	Barang dan Jasa, meliputi: a. Penawaran (barang, jasa); b. Penawaran barang (bergerak, tidak bergerak); c. Pengadaan termasuk pengumuman pengadaan, prakualifikasi, evaluasi, penunjukan lelang; d. SPK, kontrak/amandemen/ <i>addendum</i> , teguran; e. Surat Perintah Mulai Kerja; f. Serah terima pekerjaan; g. Pemeriksaan pekerjaan; h. Perpanjangan waktu; i. Denda; j. Sanggahan; k. Pemeliharaan barang/jasa; l. Inventaris termasuk pendataan, pemeliharaan, penghapusan barang milik negara					<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat/Bagian Umum/Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Sub Bagian umum pada Bagian Umum Setda; 3. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
020	m. Pengadaan Barang dan Jasa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat/Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Sub Bagian Umum pada Bagian Umum Setda; 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda

020	n. Usulan tentang pengadaan barang pakai habis beserta distribusi dan pelaporannya	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat/Sub Bagian Umum/Bagian Sekretariat pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Sub Bagian Umum pada Bagian Umum Setda; 3. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
030	<p>Kekayaan Daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang-barang tidak bergerak (tanah, berkebunan, pertanian, hutan, tambak); b.usulan penambahan aset Daerah, barang bergerak maupun tidak bergerak; c. Barang-barang tidak bergerak (gedung, asrama, monumen, bangunan bersejarah, dll); d. Barang persediaan dalam gudang; e. Alat pengangkut (laut, darat, udara); f. Peralatan kantor/pabrik g. Peralatan kesehatan/medis (rumah sakit, balai pengobatan); h. permintaan perbaikan, perawatan barang inventaris beserta pelaporannya; 	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat/Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Sub Bagian Umum pada Bagian Umum Setda; 3. BKAD

		<p>i. penghapusan aset-aset barang milik daerah; dan</p> <p>j. usulan kebutuhan barang/jasa pendukung operasional kegiatan rumah tangga dinas, rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekda beserta pelaporannya</p>				
040	Kebijakan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan dan pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
040	<p>Perpustakaan</p> <p>Perpustakaan Umum</p> <p>Perpustakaan khusus</p> <p>Perpustakaan Sekolah</p> <p>Perpustakaan Keliling</p> <p>Pengadaan Bahan Pustaka</p> <p>Pelayanan Perpustakaan</p> <p>Pemeliharaan, Perawatan, pengawetan bahan perpustakaan dan alih media bahan perpustakaan</p> <p>Kerjasama antar perpustakaan</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan, Pengolahan Bahan Pustaka dan Preservasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
040	<p>SANDI</p> <p>1. Pengamanan Persandian dan Informasi</p> <p>2. Tata kelola persandian</p> <p>3. Pembinaan, peningkatan kesadaran pengamanan informasi</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<p>1. Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik;</p> <p>2. Bagian Organisasi Setda</p>	

		pelaksanaan persandian 5. Pengelolaan <i>security operation center</i>		hukum		
045		Kearsipan Ekspedisi Surat Pengantar Pola Klasifikasi Arsip Pameran Berkas Penyusunan Arsip Pemindahan Arsip Penyerahan Arsip Pemusnahan Arsip Jadwal Retensi Arsip Berita Acara Penyusutan Arsip Daftar Pertelaan Arsip Pembinaan Kearsipan Bimibingan Teknis Kearsipan Sosialisasi Kearsipan Monitoring dan Evaluasi Kearsipan Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Fumigasi Termite Control Kapur Barus Pengawetan Audit kearsipan, evaluasi dan penilaian hasil pengawasan kearsipan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
045		Akuisisi arsip Koordinasi dan konsultasi akuisisi arsip Penerimaan, pemindahan dan penyerahan arsip statis Penelusuran dan wawancara secara lisan Penyelamatan arsip vital daerah Pengolahan fisik arsip dan informasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Arsip

		arsip				
		Penyusunan indeks, <i>guide</i> , daftar dan inventaris arsip Penyusunan arsip clue daerah Pelestarian dalam bentuk penyelamatan, pemeliharaan dan perlindungan arsip Alih media dan reproduksi arsip stabs Pengujian kualitas media arsip dan sarana kearsipan Restorasi dan registrasi arsip Autentikasi arsip stabs				
	045	Penelusuran sumber dan wisata arsip Penyajian informasi arsip dan penerbitan naskah sumber arsip Penyusunan tayangan naskah sumber arsip Pengolahan simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Penghimpunan dan penyajian data dan informasi kearsipan Pameran, publikasi dan pemasyarakatan kearsipan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Arsip
	045	Laporan kegiatan operasional Perawatan Arsip beserta pengamanan aset-aset arsip	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Sub Bagian Umum pada Bagian Umum Setda

050	RPJPN, RPJPD, Musrenbang, Musrenbangpus, RPJMN, Renstra, RPJMD, Renstra Bappeda, Program Nasional, RKP (Rencana Kerja Pembangunan), RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga) RKPD	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bappedalitbang; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
050	KUA (Kebijakan Umum Anggaran) KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) dan PPAS (Penetapan Plafon Anggaran Sementara) Jawaban Gub. Atas PandanganFraksi Nota Keuangan RKT (Rencana Kerja Tahunan) RKO (Rencana Kerja Operasional) Laporan Laporan berkala Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bappedalitbang; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
060	ORGANISASI KETATALAKSANAAN Organisasi Susunan organisasi dan tata kerja Tata tertib kantor, termasuk pengaturan hari dan jam kerja pegawai Organisasi nonpemerintah Organisasi internasional Organisasi semi pemerintah Lembaga nonstruktural Kelas jabatan Analisis jabatan Pengukuran/penilaian beban kerja	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Sub Bagian Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Organisasi Setda

		jabatan struktural dan fungsional Uraian jabatan Standar kompetensi teknis Standar kompetensi manajerial				
060		Ketatalaksanaan tata naskah dinas Stempel dinas dan stempel jabatan, Nama instansi pemerintah/ nonpemerintah, Alamat-alamat kantor dan pejabat, Ketentuan pakaian dinas dan atribut Pola hubungan kerja, standar rumah tangga Operasional prosedur hari dan jam Kerja pegawai Indeks kepuasan masyarakat Standar pelayanan Inovasi pelayanan Standar prasarana kerja pegawai	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Organisasi Setda
060		Akuntabilitas kinerja Zona integritas Reformasi birokrasi Budaya kerja	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Organisasi Setda
070		Penelitian dan Pengembangan Riset meliputi perizinan bagi peneliti, riset design, pembahasan sampai laporan riset	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. BAPPEDA Litbang; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah

070	Pengembangan Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) SINAS (Sistem Informasi Nasional)	Biasa/Terbuka	Pengguna dan eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bappedalitbang; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
070	SIDA (Sistem Inovasi Daerah) meliputi cluster kabupaten/kota dan desa Inkubator teknologi dan bisnis	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bappedalitbang; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
070	Parneran Produk Inovasi/Ristek BTC (Bisnis Teknologi Center) RapteK (Penerapan Iptek) Fasilitas HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Kajian-kajian strategis/diskusi/FGD seminar, <i>workshop</i>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bappedalitbang; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
070	Kerja sama penelitian Rapat koordinasi/rapat teknis Lokakarya Diseminasi/sosialisasi hasil penelitian Kerjasama penelitian Instansi Pemerintah Pusat/Daerah Perguruan tinggi negeri/swasta Lembaga swasta nasional, LSM Lembaga internasional Perekayasa Jaringan (Jaringan Penelitian dan Pengembangan) Publikasi ilmiah Jurnal ilmiah		Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bappedalitbang; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah

080	Konferensi pers/rapat koordinasi termasuk Gubernur, Bupati/Walikota, Pimpinan Perangkat Daerah, instansi lainnya (dalam dan luar negeri) Himpunan materi sambutan pidato Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Studi banding, kunjungan kerja	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Administrasi Pimpinan; 3. Bagian Umum Setda
080	Bahan materi sambutan pidato Bupati, Wakil Bupati, Sekda	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Sub Bagian umum pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Administrasi Pimpinan Setda; 3. Bagian Umum Setda
080	Koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat Kebijakan, Pelaksanaan dan Evaluasi dalam Pelayanan dan pembangunan dengan lembaga masyarakat, promosi dan informasi serta anjungan TMII	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sub bagian Umum pada Badan Penghubung
090	Perjalanan dinas (SPT/SPPD) meliputi: a. Bupati, Wakil Bupati b. laporan perjalanan pegawai, SPPD ke pusat, daerah dan luar daerah c. laporan basil peliputan kegiatan kunjungan kerja Bupati, Wakil Bupati, Sekda ke Provinsi/kabupaten/kota	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Sub bagian pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Administrasi Pimpinan Setda; 3. Bagian Umum Setda
090	d. laporan perencanaan kegiatan kunjungan kerja Presiden, Wakil	Rahasia	Dibatasi hanya untuk	Sangat memiliki dampak	1. Sekretariat/Bagian Umum/Sub Bagian

		Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur dan Pejabat Pusat ke daerah		pihak Panitia penyambutan protokoler Rumah Tangga, penentu kebijakan, pengawas, penegak hukum	mengganggu kinerja Perangkat Daerah bila ternyata berpotensi mengganggu keamanan kunjungan	Umum pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Administrasi Pimpinan Setda; 3. Bagian Umum Setda
		e. Laporan perencanaan kegiatan kunker Bupati, Wakil Bupati, Sekda ke Kabupaten/Kecamatan/Desa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk pihak panitia penyambutan, protokoler penentu kebijakan pengawas, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Sub Bagian umum pada Perangkat Daerah; 2. Bagian Administrasi Pimpinan Setda; 3. Bagian Umum Setda

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
B. PEMERINTAHAN (100)						
	120	PEMERINTAH Kabupaten Monografi, tambahkan kode wilayah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sub Bagian Umum, Bagian Pemerintahan Setda
	120	Kebijakan Pemerintah Provinsi Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Koordinasi SKPD Instansi vertikal Kerja sama antar provinsi/Kabupaten/daerah, dan luar Negeri Bupati, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan, dan sebagainya Wakil Bupati, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya Sekretaris Daerah, meliputi pencalonan, serah terima jabatan Badan-badan pertimbangan daerah, meliputi Muspida Penyerahan Urusan/SPM	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sub Bagian Umum, Bagian Pemerintahan Setda
	120	Pemindahan ibukota Kabupaten Pemberian dan penggantian nama kota, daerah, jalan				

		Penyerahan urusan				
120		Pembentukan/Pemekaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pemerintahan Setda
120		Pembentukan Daerah Otonom	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pemerintahan Setda
120		Pembentukan Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sub Bagian Umum, Bagian Pemerintahan Setda
120		Perubahan Batas Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sub Bagian Umum, Bagian Pemerintahan Setda
120		Pemekaran Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu	Memiliki dampak yang mengganggu	Sub Bagian Umum, Bagian

				kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	kinerja Perangkat Daerah	Pemerintahan Setda
120	Permasalahan Batas Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sub Bagian Umum, Bagian Pemerintahan Setda	
120	Pembagian Wilayah Pemerintahan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sub Bagian Umum, Bagian Pemerintahan Setda	
130	Wilayah Kecamatan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sub Bagian Umum, Bagian Pemerintahan Setda	
140	PEMERINTAH DESA APBDes/Kelurahan Permasalahan batas desa/kelurahan Penghapusan desa/kelurahan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bagian Pemerintahan Setda; 2. Disdukcapil	
170	DPRD	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat	Sekretariat DPRD	

					Daerah	
170	KEANGGOTAAN Pencalonan Pengangkatan Pemberhentian Recall Meninggal Pelanggaran					
170	PERSIDANGAN Sidang Pleno Dengar Pendapat Rapat-rapat meliputi manitia musyawarah, komisi, panitia khusus, dsb Fraksi Tata Tertib Reses Peninjauan, Study Banding					
170	HAK					
170	SEKRETARIS DPRD					
180	HUKUM Konstitusi Dasar Negara Undang Undang Dasar GBHS Konvensi					Kewenangan Pusat
	PERDATA Tanah Rumah Utang Piutang Gadai					

		Hipotik				
		Peraturan perundang-undangan tingkat provinsi meliputi peraturan daerah provinsi, peraturan gubernur dan keputusan gubernur Peraturan perundang-undangan tingkat kabupaten/kota meliputi peraturan daerah kabupaten/kota, peraturan bupati/wali kota	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Hukum Setda
	180	PIDANA				
	180	PERADILAN Jenis-jenis peradilan Peradilan Umum Peradilan Negeri Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung Peradilan Agama Islam Pengadilan Agama Islam Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi Agama Islam Mahkamah Agung Agama Islam Peradilan Militer Mahkamah Militer Tingkat Pertama Mahkamah Tinggi Mahkamah Militer Agung Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan TUN Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi TUN Mahkamah TUN Agung Upaya Hukum Banding Kasasi Derden Verzet Peninjauan Kembali				

		<p>Eksekusi Pembinaan Hukum Pembinaan Kesadaran Hukum Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Notaris</p>				
C. POLITIK (200)						
	200	Pembinaan Ideologi, Kesatuan Bangsa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	200	Evaluasi dan Pengawasan Pembinaan Ipoleksosbudhankam Orde Baru Orde Reformasi				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	210	Partai politik (Parpol) Anggaran Dasar dan ART Parpol Program kerja, data kegiatan Parpol Pembinaan Parpol Hasil Munas/Musda Parpol Struktur/kepengurusan, pengkaderan dan keanggotaan Parpol Data inventaris dan keuangan Parpol Partai/organisasi terlarang Keputusan pembubaran partai/organisasi terlarang Daftar dan data pengurus anggota partai/organisasi terlarang Izin meninggalkan tempat/domisili bagi anggota partai/organisasi terlarang Daftar berkala mengenai keadaan anggota partai/organisasi terlarang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 2. Bagian Pemerintahan Setda

		Laporan umum mengenai keadaan anggota partai/organisasi terlarang				
220		Organisasi kemasyarakatan (Ormas) Pembentukan Ormas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota Ormas Program Kerja Ormas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
220		Munas/Musda provinsi dan kabupaten/kota Pembinaan Ormas Kegiatan Ormas dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan Ormas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
220		Verifikasi dan rekomendasi hibah Ormas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
230		ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja Organisasi Musna/Musda provinsi dan kabupaten/kota Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta. penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

230	Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Persatuan Guru Republik Indonesia Persatuan Sarjana Hukum Indonesia Persatuan Advokad Indonesia Lembaga bantuan Hukum (LBH) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Persatuan Wartawan Indonesia Ikatan Arsiparis Indonesia Ikatan Pustakawan Indonesia				
240	ORGANISASI PEMUDA Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja organisasi Musna/Musda provinsi dan kabupaten/kota Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi Komite Nasional pemuda Indonesia (KNPI) Organisasi Mahasiswa Organisasi Pelajar Organisasi Pemuda Ansor Gerakan Pemuda Islam Indonesia Gerakan Oemuda Marhaenis	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
250	ORGANISASI, BURUH, TANI DAN NELAYAN Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja Organisasi Musna/Musda provinsi dan kabupaten/kota Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya		serta penegak hukum		
260		ORGANISASI WANITA Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja Organisasi Musna/Musda kabupaten/ Pembinaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
260		Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
270		PEMILU dan PILKADA Pencalonan Nomor urut/tanda gambar Kampanye Dana kampanye Petugas Pemilu Pemilih/daftar pemilih Sarana (TPS, kendaraan, surat suara, kotak suara)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 2. Bagian Pemerintahan Setda; 3. Disdukcapil

		Pemungutan suara/penghitungan suara hasil Pemilu Penetapan terpilih dan pembagian kursi anggota legislatif Penetapan pemenang Pilkada				
270		Verifikasi dan rekomendasi hibah KPU	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
280		PENGAWASAN PEMILU/PILKADA Pelanggaran Pemilu Pemantauan Pemilu Sengketa Pemilu	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 2. Bagian Pemerintahan Setda
280		Verifikasi dan rekomendasi hibah Bawaslu	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
D. KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM (300)						
300		KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP
300		KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM Kebijakan Pemerintah mengenai situasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu	Memiliki dampak yang mengganggu	Satpol PP

		<p>dan kondisi keamanan Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan Pencegahan dan penanggulangan gangguan/ancaman keamanan/ketertiban umum Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan Laporan dari instansi yang berwenang Laporan adanya kejadian / unjuk rasa Laporan adanya kejadian teroris Pengamanan Sidang (Tamunegara) Pengawasan pejabat KOORDINASI DAN KERJA SAMA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)</p>		kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	kinerja Perangkat Daerah	
300	<p>PENGAWASAN TRANTIBUM PENEGAKAN PELAKSANAAN PERDA PEMBINAAN/PENYULUHAN PELANGGARAN PERDA PATROLI WILAYAH</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	
310	<p>PERTAHANAN Darat, laut, dan udara Ketahanan bangsa Ketahanan ekonomi Ketahanan seni dan budaya, agama dan kemasyarakatan</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kewenangan Pusat	
330	<p>KEAMANAN Kepolisian Polisi Pamong Praja Huru-hara/demonstrasi Senjata api/tajam Bahan peledak</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polres; 2. Satpol PP 	

		Perjudian Surat-surat kaleng pengaduan masyarakat				
330		Bahan Laporan: - data eks narapidana teroris; - data jaringan intelijen; - data penanganan konflik/penyelesaian konflik sosial yang masih berjalan; - laporan rakor pengamanan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
330		Hasil pelaksanaan monitoring penanganan ideologi/faham lain - daftar data pengurus anggota organisasi terlarang; - daftar berkala tentang keadaan anggota organisasi terlarang Laporan umum (kondisi, jumlah kekuatan) mengenai organisasi terlarang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
330		Bendel Rahasia Intelijen meliputi: - dokumen faham lain; - dokumen Gafatar; - dokumen Persebaran HTI; - data organisasi terlarang/PKI; - data napi teroris; - data radikal kanan; - data jaringan intelejen	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
340		PERLINDUNGAN MASYARAKAT (Linmas) Kebijakan pemerintah mengenai pembentukan Linmas Pembinaan dan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP

		Pengangkatan/pemberhentian anggota Linmas Pendidikan/latihan Linmas Pelatihan PAM Swakarsa Pendidikan/latihan MENWA Pengerahan dan pengendalian Linmas Kesejahteraan bagi anggota Linmas		hukum		
340		Orientasi Bela Negara bagi Tokoh Masyarakat Pemberian tali asih bagi anggota Linmas Bantuan modal usaha bagi anggota Linmas Santunan uang duka bagi anggota Linmas Penghargaan bagi anggota Linmas				
340		Data Linmas, MENWA, PAM Swakarsa Linmas lanjut usia Orientasi kesadaran bela negara Kegiatan pelaksanaan Linmas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP
350		KEJAHATAN Makar/pemberontakan/terorisme Pembunuhan Penganiayaan/pencurian/perampasan Subversi/penyeludupan/narkotika Penipuan dan pemalsuan Korupsi/penyelewengan/ penyalahgunaan jabatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Polri;
350		Kekerasan pada perempuan dan anak Pelaporan Penanganan korban Kenakalan Kejahatan lainnya (<i>trafficking</i> , hipnotis,	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PPKBPPPA

		dll.)		hukum		
360	BENCANA Pelatihan, posko bencana Surat keputusan, Berita Acara, MoU, dan koordinasi Gunung berapi/gempa/tsunami/banjir/ tanah longsor/ angin topan Kebakaran/kekeringan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	BPBD	
370	KECELAKAAN Latihan SAR Latihan ketrampilan penyelamatan di air dan menyelam Pelatihan manajemen bagi pejabat Satkorlak dan Satlak PBP Pelatihan kemampuan Pusdalops bagi aparatus PDP Latihan ketrampilan pemadam kebakaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	BPBD	
380	LATIHAN MITIGASI BENCANA BAGI SATLAK PBP RAWAN BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR Kecelakaan lalu lintas jalan raya Kecelakaan udara Kecelakaan laut	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	BPBD	
390	Kerjasama BPBD dengan instansi lain Inventarisasi pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi dalam kegiatan penanggulangan bencana Percepatan Perubahan Peraturan Permendagri/Peraturan Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	BPBD	
390	Berita Acara Hibah Peralatan BNPB Berita Acara Pinjam Pakai Peralatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan,	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat	BPBD	

				pengawasan serta penegak hukum	Daerah	
390	Rekomendasi bantuan peralatan Peralatan Rapat koordinasi PDB	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	BPBD	
390	Kegiatan dari instansi luar BPBD terkait Pencegahan dan kesiapsiagaan Surat Keputusan Kegiatan Penanggulangan Bencana	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	BPBD	
E. KESEJAHTERAAN (400)						
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. DPMDes; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	
410 411.4 411.5 411.6	PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN Pembinaan usaha gotong royong Swadaya gotong royong Penataan gotong royong Gotong royong dinamis Gotong royong statis Pungutan Lembaga Sosial Desa (LSD) Pembinaan Latihan kerja masyarakat Pembinaan kesejahteraan keluarga Penyuluhan Kelembagaan desa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. DPMDes	
412	PEREKONOMIAN DESA				2. Bagian	

						Kesejahteraan Rakyat Setda
412	Petunjuk/pembinaan pelaksanaan Pembangunan Bantuan/stimulasi Perkreditan desa Pelaporan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Koperasi desa Badan Usaha Unit Desa (BUUD) Koperasi Unit Desa (KUD)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. DPMDes; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	
413	PRASARANA DESA Pemukiman kembali penduduk Pemugaran perumahan dan lingkungan desa Perbaikan kampung					
414	PENGEMBANGAN DESA Tingkat perkembangan desa Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), Musrenbang Kecamatan Tata Desa / Profil Desa dan Kelurahan Perlombaan Desa					
420	PENDIDIKAN Kebijakan dan program pemerintah untuk pendidikan Pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme dsb.	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	
420	Ijazah, sertifikat	Terbatas	Dibatasi hanya	Memiliki dampak	1. Dinas Pendidikan,	

				untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kepemudaan dan Olah Raga; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
420	Sekolah Luar Biasa		Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
421	Persyaratan masuk sekolah, <i>testing</i> , ujian, OSPEK Tahun Pelajaran Hari libur Kegiatan pelajar di antaranya reuni, darmawisata, widyawisata, lomba-lomba (LKS), olimpiade, olimpiade olah raga dan sains, pelajar teladan, pertukaran pelajar		Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
422	Uang Sekolah, diantaranya SPP, SPI Bea Siswa dan penghargaan siswa berprestasi Bantuan Pendidikan: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM), Bantuan Siswa Miskin (BSM) Kurikulum Karya tulis, karya ilmiah Ujian		Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
423	Sarana pendidikan (buku, perlengkapan pendidikan)		Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan	Tidak memiliki dampak yang	1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan

		Bangunan pendidikan (laboratorium dan perpustakaan) Gedung sekolah Kampus Pusat kegiatan		internal yang mempunyai hak akses	mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Olah Raga; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
424		Tenaga pengajar (guru, dosen, guru/dosen teladan, Guru/dosen berprestasi) Pertukaran guru ke luar negeri Sertifikasi guru	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
425		Sistem Informasi dan TIK pendidikan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
426		KEOLAHRAGAAN Pembinaan Keolahragaan Olahraga prestasi (PON, <i>Sea Games</i> , Kejurnas, Olimpiade) Olahraga Pendidikan (POPDA, Porseni) Olahraga rekreasi/massal (senam, sepeda santai, olahraga tradisional) Iptek dan industri olahraga Sarana dan prasarana keolahragaan Kemitraan olahraga	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pemuda dan Olahraga; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
427		KEPEMUDAAN Pertukaran pemuda Paskibraka Sarana dan prasarana Kepemudaan, meliputi sarana kegiatan remaja,	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pemuda dan Olahraga; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda

		gelanggang remaja Kemitraan pemuda karang taruna Kepramukaan/kepanduan		hukum		
430		KEBUDAYAAN Kebijakan dan program pemerintah untuk kebudayaan Pembinaan bidang kebudayaan Kesenian Cabang kesenian (seni tari, seni musik, dll)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 2. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
430		Sarana Gedung Kesenian Padepokan Lembaga adat Kegiatan adat/tradisi Usaha pertunjukan, hiburan, kesenangan, festival, pentas seni Kepurbakalan Museum Peninggalan Kuno Candi, termasuk pemugaran Sejarah Bahasa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
430		Penghayat Kepercayaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
440		KESEHATAN	Terbatas	Dibatasi hanya	Tidak memiliki	1. Dinas Kesehatan;

		Kebijakan dan program pembangunan kesehatan (pelayanan kesehatan, penanggulangan kesehatan, kesehatan masyarakat, sumber daya kesehatan) SOP praktik klinik Laporan bulanan (PTRM/HIV-AIDS/TB DOT)		untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	2. RSUD
441		PEMBINAAN KESEHATAN Gigi Mata Kanker Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Perawatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Kesehatan Ibu dan Anak Sistem Kesehatan Nasional Jaringan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPSBK)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Kesehatan; 2. RSUD/RSJ; 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
441		Bank darah rumah sakit Sanitasi rumah sakit CSSD/ <i>laundry</i> Kasus hukum rumah sakit Tenaga medis Perencanaan tenaga medis Perizinan untuk tenaga medis Standardisasi penyimpanan Distribusi IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. RSUD; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
441		Rekam Medis	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. RSUD/RSJ; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda

				serta penegak hukum		
442	<p>Rabies Antraks Leptosirosis Chikungunya Penyakit lainnya Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular A. Pektoris IMA (Irama Mastcmik Akut) Hipe Rumah Tanggaensi Stroke Diabetes Melitus Pemberantasan dan pencegahan Penyakit CA. <i>Serviks</i>, Mammae, hepar, paru dan lainnya</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan; 2. RSUD; 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 	
443	<p>Epidemiologi dan karantina (Epidka) Imunisasi <i>Surveilanse</i> Pestisida, insektisida Pencemaran Jamban keluarga sanitasi rumah tangga Kesehatan institusi <i>Higiene</i> sanitasi Tempat-tempat makanan minuman Sarana air minum Pencemaran</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan; 2. RSUD; 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 	

	<p>Kesehatan institusi, misal: Poskestren, sanitasi masjid <i>Higiene</i> sanitasi CA. Mammae <i>Higiene</i> sanitasi CA. Hepar <i>Higiene</i> sanitasi CA. Paru Kejadian khusus Dekompensasi kordosis (serangan jantung) Asma Psikosis PPOM Kecelakaan lalu lintas Kejadian Luar Biasa (KLB) Gizi dan pengawasan makanan Kekurangan makanan Bahaya kelaparan, busung lapar, gizi busuk Keracunan makanan Menu makanan rakyat Gondok endemik (GAKI) Keperawatan Kornite medik Rawat inap Rawat jalan RSUD, RSJ, RS Khusus Studi Banding Rumah Sakit Penunjang medik Radiologi</p>					<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan; 2. RSUD; 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
444	<p>Gizi Mutu Rumah Sakit Akreditasi</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan,	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan; 2. RSUD; 3. Bagian 	

		<p>IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Promosi layanan kesehatan Pendayagunaan tenaga medis Kegiatan bakti sosial tenaga medis TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia) Diklat Tenaga Kesehatan/Medis Diklat Tenaga Kesehatan/Para Medis Pendidikan di bidang kesehatan termasuk pendidikan spesialis Peralatan kesehatan Perizinan berkaitan dengan alat kesehatan Pengobatan alternatif Pijat akupuntur</p>		<p>pengawasan serta penegak hukum</p>	<p>Daerah</p>	<p>Kesejahteraan Rakyat Setda</p>
445	<p>SPI (Satuan Pengawas Internal) ISO PSBH (<i>Problem Solving for Better Hospital</i>) Jamu dan herbal Dukun Lembaga penyedia layanan kesehatan PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling Poliklinik dan balai kesehatan Rumah Sakit Bersalin Posyandu Laboratorium Kesehatan Sanatorium Kesehatan Kanker</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>1. Dinas Kesehatan; 2. RSUD/RSJ; 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda</p>	
	<p>UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Kesehatan masyarakat meliputi PKM (Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat) melalui media PKK, Posyandu, dsb Pemalsuan obat Pemberantasan dan pencegahan</p>					

		Penyakit menular langsung				
446		Tenaga medis meliputi surat izin praktik dan surat izin kerja dan pengawasan bidang keagamaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Kewenangan Pusat; 2. Dinas Kesehatan; 3. RSUD/RSJ; 4. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
450		Bantuan di bidang keagamaan Islam Peribadatan (sholat, zakat, puasa, haji/umroh) infaq. shodaqoh Rumah ibadah (masjid, musholla, surau) Tokoh agama Pendidikan agama Pendidikan tinggi agama Menengah, MTs, MA Drier, prasekolah, MI Lembaga pendidikan nonformal (TPQ/Madrasah Diniyah, pondok pesantren dll) Sarana pendidikan meliputi buku, gedung sekolah, dll	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Kewenangan Pusat; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
450		Tenaga pengajar Dakwah (pengajian, MTQ) Wakaf Mazhab Agama Islam Organisasi keagamaan bukan politik (Majelis Ulama Indonesia, Dewan Hisab Rakyat, dll) Tokoh agama, rohaniawan (da'i) Kristen Protestan, Katolik (peribadatan, rumah ibadah, gereja, dll)				

		Tokoh agama, rohaniawan (pendeta, domine, dll) Organisasi gerejani Hindu, Budha dan Kong Hu Cu (peribadatan, rumah ibadah, pura, candi, vihara, klenteng) Tokoh agama, rohaniawan Mazhab, organisasi agama				
460		SOSIAL Rehabilitasi penyandang cacat Cacat ganda Cacat fisik Cacat mental/ekspsikotik Rehabilitasi sosial Pengemis, gelandangan/orang terlantar (PGOT) Anak jalanan Tuna susila Anak nakal Tuna wisma Lanjut usia	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Sosial; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
460		Korban tindak kekerasan dan pekerja migran	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan pemerintahan.	1. Dinas Sosial; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
460		Keperintisan dan kepahlawanan Pahlawan meliputi penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan jandanya Perintis kemerdekaan meliputi Pembinaan, penghargaan dan tunjangan kepada perintis kemerdekaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Sosial; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda

		veteran Cacat veteran Kesejahteraan sosial				
460		Taman Makam Pahlawan (TMP) Penyelenggaraan undian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Sosial; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
460		Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat Sosial: Karang taruna Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Organisasi Sosial (Orsos) Dunia usaha	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Sosial; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
460		Korban kekacauan, pengungsian, rehabilitasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Tenaga Pelopor Perdamaian Program Keluarga Harapan (PKH)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Sosial; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
460		Masyarakat miskin: Raskin, BLT dll Masyarakat miskin pedesaan Masyarakat miskin perkotaan Pengelolaan data kemiskinan Sumbangan sosial	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Sosial; 2. Bagian Kesejahteraan Sosial Setda
460		Korban bencana	Biasa/Terbuka	Pengguna dari	Tidak memiliki	1. Dinas Sosial;

		Jaminan sosial Pencarian dana untuk sumbangan Penyelenggaraan undian, ketangkasan, bazar dsb Panti asuhan Bimbingan sosial Masyarakat suku terasing meliputi: bimbingan pendidikan, kesehatan, permukiman, Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dsb PMI Makam: umum, pahlawan, khusus, keluarga, raja Krematorium		eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
460		Kualitas hidup perempuan Perlindungan perempuan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kejahatan lainnya (<i>trafficking</i> , hipnotis, dll) Kesejahteraan Anak Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA) Perlindungan anak Kesejahteraan anak dan keluarga	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas PPKBPPPA; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda; 3. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
460		Kekerasan pada perempuan dan anak Pelaporan Penanganan korban	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas PPKBPPPA; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
470		KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Kebijakan dan program pemerintah untuk kependudukan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	1. Disdukcapil; 2. Bagian Kesejahteraan

		Pendaftaran penduduk Identitas penduduk Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga		mempunyai hak akses	Perangkat Daerah	Rakyat Setda
475		TRANSMIGRASI Penyiapan informasi daerah transmigrasi Informasi potensi peluang bekerja dan berusaha di daerah transmigrasi Perbandingan potensi daerah awal dan daerah transmigrasi Pemasyarakatan/sosialisasi transmigrasi Peran serta lembaga dan instansi terkait serta media massa dalam penyampaian informasi transmigrasi Publikasi transmigrasi melalui pameran dan kesenian Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal dan daerah transmigrasi Kerja sama di bidang transmigrasi Kepulangan transmigran karena daerah terjadi konflik Pemukiman transmigrasi Penggunaan tanah pemukiman transmigrasi Pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi Tats ruang satuan kawasan pengembangan, studi kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi Teknis ruang satuan pemukiman dan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Transmigrasi, Tenaga kerja Koperasi dan UKM; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda

		lokasi/peta informasi pemukiman				
		Standardisasi dan spesifikasi teknis rumah transmigran, fasilitas umum/sosial dan jaringan transportasi Tanah pemukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya, identifikasi, pengukuran dan pembuatan batas areal tanah Penyelesaian masalah tanah di lokasi permukiman transmigrasi Tata ruang permukiman transmigrasi Rancangan dan pemanfaatan areal tanah				
475		Pengkajian dan pengembangan metode pengerahan dan penempatan Teknis penyuluhan dan motivasi dalam pengerahan dan penempatan Pengerahan Pendaftaran dan seleksi calon transmigran Berkas persyaratan dan administrasi calon transmigran Transmigran yang dinyatakan lulus penyaringan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Transmigrasi, Tenaga kerja Koperasi dan UKM; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
475		Rancangan kapling TSM Pengukuran dan pembagian lahan pekarangan, lahan usaha dan fasilitas umum Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan sengketa tanah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Transmigrasi, Tenaga kerja Koperasi dan UKM; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
		Inventarisasi penataan kembali dan				

		<p>penggunaan areal tanah Pengukuran batas unit pemukiman Penyelesaian perubahan areal dan urusan perizinan pemanfaatan areal tanah Sarana permukiman transmigrasi Pembinaan dan pengendalian penyiapan sarana air bersih Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi Pembinaan dan pengendalian peningkatan serene Pembinaan, pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan lingkungan Pengerahan, pemindahan dan penempatan</p>				
475	<p>Pemberangkatan transmigran Pengangkutan transmigran melalui laut, udara, dan darat Jadwal dan tempat pelaksanaan pemberangkatan Pelaksanaan pengurusan pemberangkatan Pengawasan perjalanan transmigran Pengaturan rute pemberangkatan Alokasi penempatan dan surat perintah pemberangkatan Penempatan transmigran Kesiapan lokasi dan daya tampung</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<p>1. Dinas Transmigrasi, Tenaga kerja Koperasi dan UKM; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda</p>	
		<p>Pendataan transmigran di lokasi yang masih dibina Data transmigran yang meninggalkan lokasi di setiap UPT</p>				

	<p>Pemantauan penempatan transmigrasi pengganti Penampungan transmigrasi (transito), pelatihan transmigran dan program/metode pengajaran Penyusunan silabus dan modal pelatihan Penyusunan calon peserta/pelatih Penampungan transmigran di transito Pelayanan kesehatan bagi transmigran Pelayanan makanan bagi transmigran Pelayanan pembekalan/peralatan bagi transmigran Pembinaan masyarakat transmigrasi Identifikasi dan peninjauan pembinaan Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap penyesuaian Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pengembangan Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pembinaan Pembinaan pendidikan, penyediaan/penyiapan sarana dan usaha pengembangan pendidikan</p>				
475	<p>Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan dan status Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat Pembinaan kesehatan Penyediaan sarana kesehatan dan KB Penanggulangan penyakit dan kejadian</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<p>1. Dinas Transmigrasi, Tenaga kerja Koperasi dan UKM; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda</p>

		<p>luar biasa Pendistribusian bantuan pangan Pembinaan rohani Bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama Bimbingan adaptasi masyarakat Bimbingan pelaksanaan penumbuhan interaksi sosial Pelayanan pos di daerah transmigrasi Penyerahan UPT yang layak untuk diserahkan Penilaian transmigran teladan Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha</p>				
476	<p>KELUARGA BERENCANA Alat kontrasepsi Pelayanan KB meliputi KB Lestari, KB Mandiri Penyuluh Lapangan KB (PLKB) Pos KB desa, akseptor KB</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<p>1. Dinas PPPAPPKB; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda</p>	
480	<p>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kebijakan dan program pemerintah dalam bidang komunikasi dan informasi (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan)</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang pada Dinas Kominfosantik	
480	<p>MEDIA MASSA Surat kabar, majalah, buletin, jurnal <i>Press release</i>, klarifikasi berita, pers statistik Perindustrian perdagangan termasuk 9</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfosantik	

		(Sembilan) harga pokok Perekonomian dan perbankan Bidang lainnya Layanan informasi/ <i>leaflet</i> Masukan analisis Bupati Televisi Film dokumenter Kewartawanan/jurnalistik Pembentukan organisasi profesi Kasus-kasus kewartawanan				
		Penyalahgunaan profesi Bantuan kepada/dari organisasi profesi wartawan Wartawan Musyawarah Wartawan Indonesia Pendidikan jurnalistik khusus wartawan Temu pers/konferensi pers <i>Press tour/kunjungan</i> wartawan asing				
		Penyuluhan masyarakat, publikasi lembaga komunikasi masyarakat, lembaga pemerintah Pertemuan Bakohumas dan Kehumasan <i>Training Photography, Training</i> Berita Jurnalistik Bintek Infokam Rakorda Infokom Pendirian <i>Information Center</i> Pembinaan Bidang Infokom Hubungan antar lembaga nonpemerintah Wahana komunikasi masyarakat Pengelolaan Infonnasi dan Dokumentasi (PID)				

		Promosi luar negeri				
480		Media cetak meliputi perizinan hingga pencabutan izin bila terjadi pelanggaran Media elektronik meliputi perizinan hingga pencabutan izin bila terjadi pelanggaran Radio Pengawasan lembaga penyiaran Kelompok pemantau isi siaran Pengkajian isi siaran SDM Penyiaran Periklanan Ketentuan pemasangan reklame Pameran	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kewenangan KPID
480		Rakor pengendalian kegiatan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfoantik
480		Pengelolaan <i>website</i> Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfoantik
F. PEREKONOMIAN (500)						
500		PEREKONOMIAN Dewan stabilisasi Pengadaan pangan Pengadaan sandang Perizinan pada umumnya. Untuk perizinan sesuai Bidang, klasifikasi pada masalahnya	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Disperindag; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
500		Perizinan pada umumnya untuk	Terbatas	Dibatasi hanya	Memiliki dampak	1. DPMPTSP;

		perizinan sesuai bidang, klasifikasi pada masalahnya		untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
510		PERDAGANGAN	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Disperindag; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
510		Promosi perdagangan, pekan raya, pameran Pelelangan, distribusi Pemasaran sembako Penentuan harga pokok Bina usaha dan sarana perdagangan Rencana dan program kerja Beras, garam, minyak tanah, minyak goreng, sabun, dll Pemasaran Pertokoan, kaki lima, kios, pusat perbelanjaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Disperindag; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
510		Pasar Ekspor Izin ekspor Perdagangan luar negeri Manajemen perdagangan internasional Pemberitahuan ekspor barang	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Disperindag; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
510		Perizinan (HO, gangguan, reklame, dll) Penerbitan SIUP Perpanjangan Izin prinsip Rekomendasi Perdagangan antar pulau	Dialihkan ke kabupaten/kota			1. DPMPSTSP

		Kerjasama bahan baku Industri pemasaran Kontrak Tera dan tera ulang, biaya tera, cap tanda tera Takaran, timbangan dan anak timbangan				2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
510		Kalibrasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Disperindag; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
510		Perdagangan antar pulau Aneka usaha perdagangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Disperindag; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
510		Impor Izin impor Pemberian izin Pengendalian izin				Untuk izin impor dialihkan ke DPMPTSP
		Standar mata dagang impor Manajemen perdagangan internasional Kegiatan impor Pembinaan impor Pengendalian impor Pemantauan impor	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Disperindag
		Faktor-faktor pendukung Pengawasan mutu barang impor Penyaluran kegiatan impor Bahan konsumsi Bahan baku Bahan penolong Evaluasi dan pelaporan kegiatan impor Usaha Negara (Perjan, Perum, Persero)				2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda

		Perusahaan daerah				
510		Kerja sama bahan baku Industri pemasaran Kontrak Pengembangan potensi perdagangan luar negeri Promosi dan informasi Kerja sama Pergudangan, termasuk tangki penyimpanan Peti kemas	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Disperindag; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
510		KOPERASI Bina usaha koperasi Koperasi pertanian	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Transmigrasi, Tenaga kerja Koperasi dan UKM; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
510		Koperasi nonpertanian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Transmigrasi, Tenaga kerja Koperasi dan UKM; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
510		Pembinaan usaha Pembinaan usaha kecil Usaha mikro kecil dan menengah Permodalan koperasi Pemupukan modal Pemanfaatan modal	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Transmigrasi, Tenaga kerja Koperasi dan UKM; 2. Bagian Ekonomi

		Perbankan dan asuransi Permodalan luar koperasi Kredit program umum Kredit program khusus Distribusi dan jasa koperasi				dan Pembangunan Setda
510		Distribusi bahan pokok Distribusi aneka bahan distribusi kerja sama niaga Jasa angkutan Jasa perumahan Aneka jasa Koperasi kelistrikan, industri dan telekomunikasi Bina lembaga koperasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Transmigrasi, Tena ga kerja Koperasi dan UKM; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
510		Organisasi koperasi Anggaran dasar dan akte pendirian koperasi Pemberian badan hukum koperasi Penyelesaian pembubaran koperasi Keragaman koperasi Pengakuan koperasi sekolah Amalgamasi Tertib organisasi koperasi Penyelesaian penyelesaian/ persengketaan Bimbingan kesadaran hukum Bina hubungan alat kelengkapan organisasi koperasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Transmigrasi, Tena ga kerja Koperasi dan UKM; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
510		Bina tata laksana koperasi Klasifikasi koperasi pedesaan Klasifikasi koperasi perkotaan Klasifikasi koperasi sekunder Administrasi ketatalaksanaan koperasi Administrasi koperasi pedesaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Transmigrasi, Tena ga kerja Koperasi dan UKM; 2. Bagian Ekonomi dan

	Administrasi koperasi perkotaan Karyawan/manager koperasi Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) Penyaluran alat sekolah Bantuan pemda kepada koperasi/KUD Akuntansi koperasi pedesaan/perkotaan Akuntansi koperasi sekunder				Pembangunan Setda
510	Pengawasan koperasi Pengawasan koperasi primer Pengawasan koperasi sekunder Koperasi jasa audit Pengawasan usaha Pengawasan usaha mikro Pengawasan usaha kecil Pengawasan usaha menengah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Transmigrasi, Tenaga kerja Koperasi dan UKM; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
510	Kerja sama kantor akuntan Penyuluhan koperasi Pembinaan kader koperasi Masyarakat umum Forum Komunikasi Kelompok Tarsi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PKKL) Penilaian Tingkat Nasional	Biasa/Terbuka	Pengguna dani eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Transmigrasi, Tenaga kerja Koperasi dan UKM; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pembinaan Usaha Pembinaan Usaha Mikro Pembinaan Usaha Kecil Pembinaan Usaha Menengah				
520	PERTANIAN Tanaman pangan Rencana dan program	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan,	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat	1. Dinas Pertanian; 2. Bagian Ekonomi dan

		Bimas/inmas termasuk kredit Pelaporan dan evaluasi pertanian Produksi pada palawija Parsers gagal (Puso)		pengawasan serta penegak hukum	Daerah	Pembangunan Setda
520		Hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pertanian; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
520		Sarana usaha pertanian Peralatan meliputi traktor dan sebagainya Pembenihan dan pembibitan Pupuk	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pertanian; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
520		Irigasi pertanian Rehabilitasi lahan pertanian Tanah pertanian pangan Persawahan Perladangan Kebun Pengusaha, petani Lahan kritis	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pertanian;
520		Perlindungan tanaman Pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan Hama tanaman pangan Pemberantas Pestisida Agensia pengendalian hayati	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pertanian; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda

520	Pengembangan Sumber Daya Pertanian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pertanian; 2. BKPSDM
520	Pemasaran dan promosi pertanian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pertanian; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
520	KEHUTANAN Perencanaan hutan <i>Survey</i> <i>Survey</i> PPA <i>Survey</i> areal <i>Survey</i> pembinaan hutan <i>Survey</i> potensi hutan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
520	Tata Ruang Kawasan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP
520	PERIKANAN DAN KELAUTAN Perumusan kebijakan, rencana, program, statistik, Prospek, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan dan kelautan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

520	<p>Penyuluhan Pengembangan dan pemberdayaan penyuluh Pengembangan SDM penyuluh Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap Pemberdayaan nelayan Usaha perikanan Penangkapan ikan Sertifikasi hasil tangkapan ikan dan cara penangkapan ikan</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<p>1. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda (PANGAN)</p>
520	<p>Pengendalian penangkapan ikan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan Izin usaha perikanan tangkap Penerbitan buku kapal perikanan, Pendaftaran kapal Teknologi Produksi perikanan Standardisasi mutu hasil perikanan</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<p>1. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda</p>
520	<p>Perjanjian kerja sama nelayan andon dengan profesi lain Pengendalian sumber daya ikan, pembinaan kelompok masyarakat Pengawas, mediasi, penyelesaian konflik antar nelayan</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<p>1. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda</p>
	<p>Penanganan tindak pidana sumber daya kelautan perikanan Koperasi kapal pengawas perikanan Penetapan rencana zonasi, pengelolaan dan aksi pengelolaan pesisir dan wilayah pulau-pulau kecil Pemberian rekomendasi, izin lokasi dan pemanfaatan</p>				

		Ruang laut di bawah 12 (dua belas) mil di luar minyak dan gas bumi				
520		Perikanan budidaya: CBIB, CBIC Sertifikasi kesehatan ikan Usaha perikanan Pelatihan nelayan Pembinaan wanita nelayan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
520		Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan Ekspor dan impor hasil perikanan Pemasaran dalam negeri Pengusaha perikanan Sarana perikanan Rekomendasi izin usaha perikanan (pembenihan/pembesaran) Fasilitas perizinan: SIUP, SIFT, SKP Sertifikasi cara pembenihan ikan Permodalan dan investasi kelompok Pembudidaya ikan Pengendalian hama dan penyakit ikan Laboratorium kesehatan ikan Obat-obatan termasuk sertifikasinya Kepelabuhanan perikanan pantai Pengembangan pelabuhan perikanan Bimbingan teknis pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran TPI/PPI Peralatan penangkapan: kapal, perahu, <i>faring</i> , <i>pump</i> dsb Konservasi dan suaka Laut Transplantasi bibit karang Garam, terumbu karang, <i>mangrove</i>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pertanian; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda

		Rehabilitasi sumber daya kelautan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Harta karun di dalam laut Pembinaan/pendidikan masyarakat pesisir				
520		PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Produksi Perbibitan Penyebaran dan pengembangan peternakan Budidaya Usaha peternakan Pelayanan usaha Pengolahan hasil dan pemasaran Pengembangan SDM dan kelembagaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pertanian 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
520		Peternakan Kesehatan hewan Pengamatan dan penyidikan penyakit hewan Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan Obat-obat hewan Pelayanan kesehatan hewan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pertanian 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
520		Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan zoonosis dan kesejahteraan hewan <i>hygieni</i> dan sanitasi Produk hewani Laboratorium kesehatan hewan Pengujian mutu asal hewan Pengujian mutu produk bahan asal hewan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pertanian 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda

		Inseminasi buatan				
520		Produksi distribusi dan pemasaran Pemeliharaan ternak dan pelayanan reproduksi Pembibitan dan budi daya ternak Ternak nonruminansia Ternak ruminansia	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pertanian 2. Bagian Perekonomian Setda
520		Perkebunan Kemitraan Kelompok tani Usaha perkebunan Program dan pelaporan Monitoring Statistik perkebunan Pembibitan/benih Produksi Rekomendasi izin usaha perkebunan Pemasaran hasil perkebunan Perlindungan tanaman Hama Pestisida Agensia pengendalian hayati	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pertanian; 2. Bagian Perekonomian Setda
		Alat dan mesin perkebunan <i>power sprayer, hand sprayer, polibag</i> Alat laboratorium perkebunan reagen Sarana/alat produksi perkebunan Pengolahan lahan terasering Pemasyarakatan Penyuluhan, sosialisasi, informasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian
520		KETAHANAN PANGAN Ketersediaan pangan Kerawanan pangan Sumber daya pangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pertanian ; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan

		Analisis dan kajian ketersediaan pangan Neraca bahan makanan Infrastruktur sumber pangan Program bimbingan massal Pengembangan sarana sumber daya Pembinaan teknologi sarana produksi dan permodalan Kelembagaan		serta penegak hukum		Setda
520		Agribisnis Mutu hasil Pengelola hasil pangan Pemasaran hasil Kementriaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pertanian ; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
520		Distribusi pangan dan cadangan pangan Harga pangan Neraca pangan Teknisi harga pangan Sistem dan pola distribusi Sarana dan prasarana distribusi Pengadaan dan cadangan pangan Kewaspadaan dan keanekaragaman pangan Keamanan dan mutu pangan Pola konsumsi pangan masyarakat Sistem Informasi Pangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pertanian; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
520		Kelembagaan keamanan pangan Bimtek dan supervisi kelembagaan pangan Pengawasan keamanan pangan segar Sertifikasi jaminan keamanan pangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pertanian 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda

		segar Bimtek dan supervisi pengawasan keamanan		hukum		
520		Promosi penganekaragaman pangan B2SA Pengembangan pangan lokal Inovasi teknologi pengolahan pangan Lokal bimtek dan supervisi pangan lokal Analisis dan kajian potensi pangan lokal	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pertanian 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
520		PENYULUHAN Sumber daya manusia Kelembagaan Penyelenggaraan penyuluhan Sosialisasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pertanian 2. BKPSDM; 3. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
530		PERINDUSTRIAN Undang-Undang gangguan Industri logam Industri mesin/elektronik Industri kimia/farmasi Industri tekstil Industri makanan/minuman	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Disperindag; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
530		Aneka industri/perusahaan <i>Home Industry</i> Aneka kerajinan Pemasaran hasil industri Ekspor hasil industri	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Disperindag; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
		ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Minyak dan gas bumi Pengusahaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan,	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat	1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan

	Perizinan Rekomendasi Kontrak Karya		pengawasan serta penegak hukum	Daerah	Setda
	Pengolahan Penyaluran Tangki, pompa, <i>tanker</i> Energi Energi alternatif Gas rawa Bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) Biogas Energi bare terbarukan Perizinan Rekomendasi Pembinaan dan pengawasan Konservasi energi Pemetaan energi Rencana Umum Perencanaan Energi Daerah (RUPED) Pascatambang Reklamasi Penutupan/Air tanah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
	Cekungan Air Tanah (CAT): pemetaan, imbuan, lepasan Konservasi Pengendalian daya rusak Rekomendasi teknis Sumur artesis, sumur bar, sumur gali (pasak) Pengusaha pengebor (APATINDO) Sumur pantau Harga dasar air/nilai perolehan air Hidrologi Geologi				

	<p>Pemetaan Mitigasi bencana geologi Vulkanologi, pengawasan vulkanologi Panas bumi Hidrogeologi Gerakan tanah (longsor, amblesan) Pengawasan, pengendalian Hidrologi Kesamudraan Penghematan energi</p>				
540	<p>Pertambangan, mineral dan batubara Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP) WIUP batuan WIUP bukan logam WW logam WIUP Batubara Rekomendasi Teknis Perizinan IUP eksplorasi IUP Operasi Produksi</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
	<p>IUP Operasi Produksi Khusus Izin Usaha Jasa Pertambangan Pencabutan izin Pembinaan Pengawasan Pengawasan usaha pertambangan Penerbitan kegiatan pertambangan</p>				

550	<p>PERHUBUNGAN Perhubungan darat Angkutan jalan raya Perizinan trayek Terminal Alat angkutan Trayek Angkutan Dalam Trayek Angkutan Tidak Dalam Trayek Angkutan Penumpang Angkutan Barang</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<p>1. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan; 2. DPMPSTSP</p>
550	<p>Keamanan lalu lintas, rambu-rambu Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (KIR) Kecelakaan lalu lintas Uji mutu Keselamatan, rambu-rambu Lalu lintas jalan raya</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<p>1. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan;</p>
550	<p>Lalu lintas sungai dan danau Perizinan laut Perkapalan mat angkutan Angkutan sungai Keselamatan, rambu-rambu Alur dan kolam pelabuhan Trayek Sarana/kapal Kecelakaan Perhubungan laut Pelabuhan laut Lalu lintas angkutan laut Keamanan lalu lintas, rambu-rambu Pelayaran dalam negeri Pelayaran luar negeri</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<p>1. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan;</p>

	<p>Pelayaran haji Pelayaran <i>charter</i>/wisata turis Pelayaran khusus Pelabuhan Alur layar Terminal penumpang/kontainer Terminal keberangkatan penumpang Terminal kepulangan penumpang Pelabuhan khusus/dermaga khusus Pergerakan/perawatan Alur pelayaran Kolam pelabuhan Reklamasi pantai Dumping area Pekerjaan bawah air (<i>salvage</i>)</p>				
--	--	--	--	--	--

	Penjagaan pantai dan penganggulangan Keselamatan di laut (GAMAT) Patroli bandar Patroli perairan Sertifikat awak kapal Kecelakaan, gangguan Kecelakaan penumpang/kapal Kecelakaan barang Gangguan sarana/prasarana Pembijakan/penyelundupan Pencemaran Perizinan berlayar/izin Pembangunan/izin usaha Perkeretaapian Sarana meliputi lokomotif, gerbong, bogie Prasarana (jalan/jembatan) Angkutan penumpang (perkeretaapian) Angkutan barang (perkeretaapian) Keselamatan (perkeretaapian) Kecelakaan (perkeretaapian) Perawatan/perbaikan Perizinan				
550	Perhubungan udara Lalu lintas angkutan udara Penerbangan domestik Penerbangan luar negeri Penerbangan haji Penerbangan <i>charter</i> /nonreguler Penerbangan khusus/jembatan udara Pelabuhan/bandar udara Tanah/lokasi bandara landasan <i>appron</i> Terminal penumpang terminal <i>cargo</i>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan;

		<p>Perlengkapan parkir kendaraan alat angkutan udara pesawat udara Dermaga Muatan dalam negeri muatan luar negeri Sertifikasi kelaikan kelaikan pesawat Udara kelaikan peralatan penunjang Keselamatan Rambu-rambu Perakitan/Kalibrasi Fasilitas Keselamatan Telekomunikasi Penerbangan Asuransi Asosiasi SATPAM Rally Udara/Lomba Perizinan Izin Terbang/Flight Approval Usaha KegiatanPenunjang Penerbangan/EMPU Pembukaan Kantor Cabang Rekomendasi Ketinggian Bangunan Pembangunan Bandar Udara Khusus</p>				
550		<p>POS Pembinaan Kebutuhan fasilitas Rehabilitasi/perawatan Bina usaha/pengawasan/penertiban Standardisasi perangkat Tanah/bangunan Filateli Asosiasi Laporan dan evaluasi Pelayanan, jasa pos/titipan/giro</p>				Kewenangan Pusat
550		<p>Benda pos/perangko Sampul peringatan</p>				Kewenangan Pusat

		Jasa pos elektronik Perizinan Rekomendasi usaha jasa pos/titipan Pembukaan agen/cabang Gangguan sarana dan prasarana Kecelakaan Sabotase Penyeludupan				
550		Teknologi informasi Kebijakan Peralatan Telepon	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfoantik
550		Internet/CTSO Telegram, telex/SBB, <i>faximile</i> Satelit, stasiun bumi Radio komunikasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfoantik
550		Sistem Pembinaan/penertiban Perizinan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfoantik
550		Pariwisata dan rekreasi Usaha pariwisata Usaha jasa pariwisata Usaha jasa biro perjalanan wisata Restoran dan rumah makan Izin usaha objek dan atraksi wisata Pengusaha objek dan daya tarik wisata Usaha sarana pariwisata Izin pariwisata	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda

		Izin usaha pariwisata Izin usaha jasa pariwisata Izin pengusaha objek dan daya tarik wisata Izin usaha sarana				
550		Wisatawan Wisatawan nusantara Wisatawan mancanegara Promosi dan informasi pariwisata dalam negeri dan luar negeri Perhotelan Status hotel Kelas hotel Tarif <i>Travel Service</i> Pramu wisata	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
		Biro perjalanan/angkutan wisata <i>Souvenir</i> Kemudahan wisata (visa, bea cukai, karantina) Tempat rekreasi Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Hasil karya manusia Rehabilitasi/perawatan Pengembangan fasilitas Tanah/bangunan Bina usaha Insitusi Asosiasi Lembaga kepariwisataan	Biasa/Terbuka	Pengguna dan eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
550		Metereologi dan hidrologi Data debit andalan Curah hujan Klimatologi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas PU; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan

		Hujan buatan Peneropongan bintang		akses		Setda
560		TENAGA KERJA Data permintaan TKI/TKW dari luar negeri Data persediaan TKI/TKW dari daerah <i>Job order</i> TKI ke luar negeri oleh PJTKI Rekrutmen calon TKI/TKW seleksi naker ke luar negeri pendaftaran dan seleksi calon TKI/TKW Berkas persyaratan calon TKI/TKW	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Transmigrasi, Tenaga kerja Koperasi dan UKM;; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
560		Pemeriksaan dan hasil cek kesehatan TKI/TKW Persyaratan naker TKI/TKW Permohonan rekomendasi paspor rumah tangga Perjanjian kerja TKI/TKW Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI) Permohonan fiskal ke luar negeri Pelatihan TKI/TKW Pemberangkatan naker Pemberangkatan ke luar negeri Pembekalan akhir pemberangkatan TKI/TKW ke luar negeri Berita acara serah terima TKI/TKW	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Transmigrasi, Tenaga kerja Koperasi dan UKM;; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
560		Pemulangan naker Kepulangan TKI/TKW karena kontraknya habis Pemulangan TKI/TKW legal TKI/TKW terkena kasus pidana Terdidik (TKMT) Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Transmigrasi, Tenaga kerja Koperasi dan UKM;; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda

		Penempatan naker nonterdidik dan nonprofesional Pengembangan kesempatan Berusaha/peluasan kerja Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Lembaga penyalur naker Izin pendirian lembaga penyaluran				
		Naker antar kerja lokal/daerah dan antar kerja negara (AKAN) Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKIBKSBKK) Pencabutan Izin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI, BKK, BKS)				
560		Tenaga Kerja Asing Rekomendasi Perpanjangan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing Data Tenaga Kerja Asing Kecelakaan/Kematian Tenaga Kerja Asing Pemulangan Tenaga Kerja Asing Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing Tenaga Kerja Asing Ilegal	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Transmigrasi, Tenaga kerja Koperasi dan UKM;; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
570		PENANAMAN MODAL Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Asing Modal Patungan (<i>joint venture/</i> penyertaan modal) Pasar Uang dan Modal Saham	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	DPMPSTSP

580	PERBANKAN MONETER Kredit Asuransi dana kecelakaan lalu lintas Polis Premi Tertanggung/pemegang polis Uang pertanggungan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kewenangan pada Bagian Kredit Bank
580	Investasi Tabungan Deposito Tabanas Tasks Tapelpram Bank Pembangunan Daerah Bank Alat Pembayaran meliputi cek, giro wesel, transfer	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kewenangan pada Bagian Pelayanan Bank
590	AGRARIA Tata Guna Tanah Pengurusan Hak-hak Tanah Guna Usaha Hak Guna Bangunan Pemetaan dan Pengukuran Perpetaan Penyediaan Data, Peta dan Publikasi				Kewenangan Pusat

590	Fakta Tata Guna Tanah Tanah Kritis Landreform Redistribusi Pendaftaran Pemilik dan Pengurus Tanah Pertanian Penentuan Tanah Obyek Landreform Pembagian Tanah Landreform Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform Ganti Rugi Ganti Rugi Tanah Kelebihan Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan Ganti Rugi Tanah Absentee Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee Ganti Rugi Tanah Partikelir Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir Bagi hasil Penetapan Imbangan Gadai Tanah Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Sengketa Petjanjian Bagi Hasil Gadai Tanah Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah Pelaksanaan Gadai Tanah Sengketa Gadai Tanah Bimbingan dan Penyuluhan Pengembangan Yayasan Dana <i>Landreform</i> (YDL)				Kewenangan Pusat
-----	--	--	--	--	------------------

590	Pengurusan hak-hak tanah Penyusunan program dan bimbingan teknis Sewa tanah Sewa tanah untuk tanaman tertentu: tebu, tembakau, rosela, <i>corchorus</i> Hak milik Perorangan Badan Hukum Hak pakai Perorangan Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing Badan Hukum Badan Hukum Indonesia Badan Hukum Asing, kedutaan, konsulat, Kantor Dagang Asing Tanah gedung-gedung negeri Guna Usaha Perkebunan besar Perkebunan rakyat Peternakan Perikanan Kehutanan Hak Guna Bangunan P3MB (Panitia Pelaksanaan Pengusaha Milik Belanda) Badan Hukum Asing Belanda-PBK No. 5/56 Pemulihan Hak (Perpres 411960) Hak Pengelolaan				Kewenangan Pusat
-----	---	--	--	--	------------------

590	PN Perumnas, <i>Bonded Ware House</i> , Industrial Estate, Real Estate Perusahaan daerah Pembangunan Perumahan Sengketa Tanah Peradilan Perkara Tanah Pencabutan dan Pembebasan Tanah Pencabutan Hak Pembebasan Tanah Ganti Rugi Tanah Pendaftaran Tanah Pengukuran/Pemetaan Fotogrametri Terristris Triangulasi Peralatan Dana Pengukuran (Permen Agraria No. 6/1960) Sertifikat Penjabat Pembuatan Akte Tanah Transmigrasi Tata Guna Tanah <i>Landreform</i> Pengurusan Hak-hak Tanah Pendaftaran Tanah				Kewenangan Pusat
-----	---	--	--	--	------------------

G. PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAKERJAAN (600)						
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN Perumusan Kebijakan Bidang pekerjaan umum, pelaksanaan kebijakan, Evaluasi dan pemantauan kebijakan Evaluasi laporan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1.Dinas PU; 2.Bagian Administrasi Pembangunan Setda	
600	Arsitektur Bahan bangunan Tanah dan batu Aspal Besi dan logam lainnya Besi beton Besi profil (konstruksi) Paku	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1.Dinas PU; 2.Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda	
600	Alurnunium profil Bahan-bahan perlindungan dan pengawet (cat, tech oil, pengawet kayu) Semen Terhadap serangga Terhadap radiasi atom	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PU	
600	Kayu Bahan penutup atap Alat-alat penggantung dan pengunci Bahan-bahan bangunan lainnya Instalansi Instalansi bangunan Instalansi listrik Instalansi air/sanitasi Instalansi pengatur udara Instalansi akustik Instalansi cahaya/penerangan Konstruksi pencegahan Konstruksi pencegahan terhadap	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PU	

		kebakaran, terhadap gempa, terhadap angin/udara/panas, terhadap kekaduhan, terhadap gas/ <i>explosive</i>				
610	PENGAIRAN Irigasi Bendungan waduk Bendungan Tanggul Menara pengambilan Pembangunan dermaga Bangunan pengambilan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah		
	Bendungan Bendungan dengan pintu bilas Bendungan dengan pompa Pelimpahan banjir Inventarisasi data pantai Laporan kejadian banjir Pengambilan bebas Pengambilan bebas dengan pompa Sumur dengan pompa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PU	
610	Kantung Lumpur Silf ekstretor Escape chenel Bangunan pembawa Saluran Saluran induk Saluran sekunder	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PU	
610	Suplesi Tersier Saluran kwarter Saluran pasangan Saluran tertutup/terowongan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PU	

		<p>Bangunan Bangunan bagi Bangunan dan sadap Bangunan sadap Bangunan check Bangunan terjun Bax Tersier Got miring Talang Syphon Gorong-gorong Pelimpahan samping Bangunan Pembuangan Saluran Saluran Pembuangan induk Saluran Pembuangan sekunder Saluran Pembuangan terrier Bangunan Bangunan out let Bangunan terjun Bangunan penahan banjir Gorong-gorong pembuangan Talang buang Syphon pembuangan Bangunan, Jalan</p>		hukum		
	610	<p>Jalan inspeksi Jalan Logistik Jembatan Jembatan inspeksi Jempatan Hewan Tangga cuci Kubangan kerbau Waduk lapangan</p>	Terbatas	<p>Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum Dibatasi hanya untuk penentu</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah</p>	Dinas PU

	<p>Bangunan penunjang jaringan telepon Stasiun argo Bangunan TPI dan pasar ikan Polder Tanggul keliling Tanggul Bangunan penutup sungai Jembatan Bangunan pembawa Saluran muka Saluran pembawa induk Saluran pernbawa sekunder Saluran stasiun pompa pemasukan Bangunan bagi Gorong-gorong <i>Syphon</i> Check Dam <i>Syphon</i> Saluran pengaman Saluran banjir Saluran <i>drainage</i> Corepure, Bangunan lainnya</p>		kebijakan, pengawasan serta penegak hukum		
	<p><i>Warning system</i> Stasiun, stasiun pompa, stasiun pengukur curah hujan, stasiun pengukur air, stasiun pengukur cuaca Stasiun pos penjagaan Pengaman pantai Tanggul Krib Bangunan LAINYA Air permukaan (danau, waduk, sungai)</p>				
620	<p>JALAN Jalan provinsi</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu	Memiliki dampak yang mengganggu	Dinas PU

		Daerah penguasaan Tanah		kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	kinerja Perangkat Daerah	
620		Bangunan Bangunan sementara Jalan sementara Kantor proyek Gedung proyek Barak kerja Laboratorium lapangan Rumah Badan jalan Pekerjaan tanah (<i>earth work</i>) Stabilisasi Perkerasan Lapisan pondasi bawah Lapisan pondasi Lapisan permukaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas PU; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
620		<i>Drainage</i> Parit tanah Gorong-gorong (<i>culvert</i>) Buku trotoir Tanah Perkerasan Pasangan Median Tanah Tanaman Perkerasan Pasangan Daerah sampingan Tanaman pangan Bangunan pelengkap dan pengaman Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas PU; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda

		<p>Lampu penerangan Lampu pengaturan lalu Lintas Patok-patok KM Patok-patok R.O.W. (sempadan) Rel pengarnanan Pagar Turap penahan Bronjong Jalan Provinsi Daerah penguasaan Tanah Bangunan Jalan sementara Jembatan sementara/Kantor/Gedung</p>				
620	<p>Perkerasan (lapis pondasi, lapis permukaan) Drainase (gorong-gorong, parit) Median Daerah samping (pagar, tanaman) Bangunan pelengkap dan pengamanan (rambu-rambu)</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PU	
630	<p>JEMBATAN Jembatan pada jalan Provinsi Daerah penguasaan Tanah Tanaman Bangunan Bangunan sementara Jalan sementara Jembatan sernentara Kantor Proyek Gedung Proyek Barak kerja Laboratorium lapangan Rumah</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dines PU	

		Pekerjaan tanah (earth work) Galian tanah Timbunan tanah Pondasi Pondasi kepala jembatan Pondasi pilar Pondasi angker Bangunan bawah Kepala jembatan Pilar Piloon				
630		Landasan Bangunan Gelagar Lantai Perkerasan Jalan orang/trotoar Sandaran Talang air	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PU
630		Bangunan pengaman Turap/penahan Bronjong Strek Dam Kist Dam Coupute Krip Bangunan pelengkap Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas Patok pengarnanan Patok R.O. W. (sempadan) Oprit Badan Perkerasan Drainage	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PU
640		Baku				

		Median Jembatan pada jalan Provinsi Daerah penguasaan Tanah Tanaman Bangunan				
		Bangunan sementara Jalan sementara Jembatan sementara Kantor Proyek Gedung Proyek Barak kerja Laboratorium lapangan Rumah Pekerjaan tanah (<i>earth work</i>) Galian tanah				
630		Timbunan tanah Pondasi Pondasi kepala jembatan Pondasi pilar Pondasi angker Landasan Bangunan Gelagar Lantai Perkerasan Jalan orang/trotoir Sandaran Talang air Bangunan pengaman Turap/penahan <i>Bronjong strek darn kist dam coupute krip</i> Bangunan pelengkap rambu-rambu/	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PU

		tanda-tanda lalu lintas patok pengaman Patok R.O.W. (sempadan), Oprit				
		Badan Perkerasan Drainage Baku Median Jembatan pada jalan Nasional Daerah Penguasaan (tanah, tanaman bangunan) Bangunan sementara (gudang proyek, kantor proyek) Pondasi Bangunan bawah Bangunan (gelagar, lantai, sandaran, perkerasan) Bangunan pengamanan (bronjong strek dam, krib) Bangunan pelengkap dan pengaman				
		BANGUNAN Bangunan Pemerintah: Gedung Pengadilan, Rumah Pejabat negara, Gedung DPR, Gedung Balai Kota, Penjara, Perkantoran Bangunan Pendidikan: Tamara Kanak- kanak, SD & Sekolah Menengah, Perguruan Tinggi bangunan Rekreasi Bangunan Olah Raga Gedung, Kesenian, Gedung Pemancar Bangunan Perdagangan: Pusat Perbelanjaan, Gedung Perdagangan Perkantoran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PU
		Bangunan Pelayanan Umum: Mardi,				

		Cuci, kakus (MCK) Umum Gedung parkir Rumah sakit Gedung Telkom Terminal Angkutan Urnum/Angkutan Air/Angkutan Darat Bangunan Keagamaan, Bangunan Peninggalan Sejarah Monumen Candi Kraton Rumah Tradisional Bangunan Industri Bangunan Tempat Tinggal Rumah Perkantoran				
640		Rumah Pedesaan Rumah contoh Real estate Elemen Bangunan Pondasi Diatas tiang binding Penahan beban Tidak menahan beban Atap Lantai/langit-langit Suspendend Solit Pintu/jendela, Pinto hermonik, Pinto biasa, Pinto sorong Jendela kayo, Jendela sorong, Jendela vertikal	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki darnpak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas PU; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
640		Fasilitas pengadaan tanah Perumusan perencanaan teknis Pengoordinasian fasilitas pengadaan tanah Inventarisasi kebutuhan pengadaan tanah, penetapan lokasi, ganti rugi dan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas PU

		santunan Pengadaan/pembebasan tanah untuk aset				
		Daerah sampai dengan sertifikatnya Penetapan objek/subjek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah dan absente lintas daerah kabupaten/kota Fasilitasi administrasi pertanahan Penetapan tanah ulayat lokasinya lintas daerah Evaluasi dan Pelaporan				2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
640		FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN Penusunan kebijakan teknis Penyiapan bahan pengoordinasian Menyiapkan perumusan kebijakan teknis Fasilitasi penyediaan rumah Inventarisasi permasalahan pertanahan kabupaten/kota Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kab/kota Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santuanan tanah untuk pembangunan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas PU; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
		Inventarisasi pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kab/kota. Penyelesaian masalah tanah lintas daerah Evaluasi dan pelaporan				

640	PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN Perumusan kebijakan teknis Menyiapkan bahan pengoordinasian. Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kab/kota Pemberian izin lokasi Evaluasi dan pelaporan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta. penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas PU; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
640	PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN Perencanaan teknis Pembiayaan perumahan Perencanaan perumahan Pernbangunan perumahan Pelayanan data teknis/konstruksi perumahan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas PU
640	PERUMAHAN UMUM Perumusan kebijakan teknis Penyediaan prasarana sarana utilitas umum Rumah korban bencana daerah Fasilitasi penyediaan rumah Penyediaan rumah susun khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas PU;
	Rumah tapak sederhana sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah Pelaporan di bidang perumahan umum				2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
640	PERUMAHAN SWADAYA Kebijakan teknis di bidang perumahan swadaya Pengoordinasian di bidang perumahan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas PU; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan

		swadaya Pengembangan perumahan swadaya. Fasilitasi dan stimulan Pembangunan, pemanfaatan rumah bagi rumah tangga miskin		serta penegak hukum		Setda
640		PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN Perumusan kebijakan teknis Penyiapan bahan pengoordinasian Perencanaan petunjuk teknis Bimbingan teknis dan supervisi Pengembangan prasarana dan sarana utilitas Evaluasi dan pelaporan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas PU; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
640		PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTILITAS KAWASAN PERMUKIMAN Perumusan kebijakan teknis Menyiapkan bahan pengoordinasian Pengkajian sarana dan prasarana utilitas, penyusunan dan pengembangan Pengembangan jejaring kemitraan Evaluasi dan pelaporan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas PU; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
640		PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN Perumusan kebijakan teknis Pengoordinasian, bimbingan teknis dan supervisi Pengkajian dan penyusunan inovasi Fasilitasi peningkatan Pengembangan jejaring kemitraan Evaluasi dan pelaporan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas PU; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda

	<p>PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Penusunan kebijakan teknis Penyiapkan bahan pengoordinasian Penyusunan <i>database</i> Pengelolaan data Pengelolaan sistem informasi dan publikasi Pemanfaatan rumah bagi korban bencana alam Pemeliharaan sarana dan prasarana utilitas perumahan swadaya Pemberdayaan dan kemitraan Evaluasi dan pelaporan</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum</p>	<p>Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>1. Dinas PU; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda</p>
--	--	-----------------	---	---	---

650	<p>TATA RUANG KOTA Daerah perdagangan pelabuhan Daerah pusat perbelanjaan Daerah perkantoran Daerah pemerintahan Daerah perumahan (<i>site & servei</i>) Kepadatan rendah (<i>low density</i>) Kepadatan tinggi (<i>high density</i>) Daerah industri Industri berat Industri ringan Industri rumah (<i>home industry</i>) Daerah rekreasi (<i>open space</i>) <i>Public garden</i> <i>Sport & playing fields</i> <i>Open space</i> Transportasi (fate letak) Jaringan jalan Penerangan jalan Jaringan kereta api</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas PU; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
650	<p>Jaringan sungai Assineering Saluran pengumpulan Instansi pengolahan Bangunan Bangunan penyaring Bangunan penghancur kotoran Bangunan pengendapan Bangunan pengering lumpur Unit disinfektan/Unit perpompaan</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas PU
	<p>Kesehatan lingkungan Persampahan Bangunan pengumpulan Bangunan pemusnahan</p>				

		Pengotoran udara Pengotoran air Air buangan industri Kegaduhan Kebersihan kota				
660		TATA LINGKUNGAN Lingkungan hidup Kebersihan lingkungan Pencemaran Pencemaran air Pencemaran udara Pencemaran tanah pencemaran limbah padat dan bahan berbahaya beracun (B3) Kerusakan lingkungan Konservasi pesisir dan laut Konservasi sumber daya alam	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan; 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda
		Pentaatan Hukum Lingkungan Laboratorium lingkungan air, udara, tanah Analisis dampak lingkungan Pengembangan teknologi lingkungan Pengembangan kapasitas Pengamanan lingkungan				Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perhubungan
680		PERALATAN PEKERJAAN UMUM	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas PU;

H. PENGAWASAN (700)						
700	PENGAWASAN Kebijakan dan program pengawasan Pengawasan perencanaan pengadaan/proyek Pengawasan inventarisasi aset pengawasan organisasi dan tata laksana Pengawasan perpustakaan dan dokumen Pengawasan penelitian/riset Pengawasan perhubungan, komunikasi informasi dan teknologi Pengawasan pertanahan/BPN	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektorat; 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Sub Bagian Umum masing- masing Perangkat Daerah	
710	BIDANG PEMERINTAHAN Pengawasan pemerintahan provinsi Pengawasan pemerintah daerah kabupaten/kota Pengawasan pemerintahan desa	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektorat; 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Sub Bagian Umum masing- masing Perangkat Daerah	
720	BIDANG POLITIK Pengawasan partai termasuk pendanaan partai, atribut partai, dll Pengawasan pembinaan ipoleksosbudhankam Pengawasan organisasi meliputi organisasi kemasyarakatan, profesi, wanita, buruh/tani dan kepemudaan Pengawasan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta.penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektorat; 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Sub Bagian Umum masing- masing Perangkat Daerah	
730	BIDANG KEAMANANIKETERTIBAN Pengawasan Kesbangpolinmas Pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Bencana	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah		

		Alam/SAR		serta penegak hukum		
740		BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Pengawasan pembangunan desa Pengawasan penyelenggaraan pendidikan Pengawasan kebudayaan Pengawasan kesehatan/makanan/obat Pengawasan SARA (Suku Agama Ras) Pengawasan kesejahteraan sosial Pengawasan kependudukan Migrasi/urbanisasi Pengawasan kehumasan, media massa dan penyiaran Pengawasan bantuan/subsidi masyarakat	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	
750		BIDANG PEREKONOMIAN Pengawasan Perdagangan dan Perindustri Pengawasan Pertanian dan Perkebunan Pengawasan Kehutanan Pengawasan Pertambangan/ESDM Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan Pengawasan Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian Pengawasan PMDN/PMA Pengawasan Perbankan/Moneter Pengawasan Kelautan dan Perikanan	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektorat; 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Sub Bagian Umum masing-masing Perangkat Daerah
760		BIDANG PEKERJAAN UMUM Pengawasan Pengairan Pengawasan Jalan Pengawasan Jembatan	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	

		Pengawasan Bangunan		serta penegak hukum		
		Pengawasan Tata Ruang Kota Pengawasan Tata Lingkungan Pengawasan Ketenagaan Penl awasan Air Minuet				
770		PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK Penyimpangan Pejabat Publik	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	
780		BIDANG KEPEGAWAIAN Pengawasan Pengadaan PNS Pengawasan Penilaian dan Diplin PNS Keanggotaan PNS dalam Parpol Penyimpangan Pejabat/PNS Persengketaan PNS	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektorat; 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Sub Bagian Umum masing-masing Perangkat Daerah
790		BIDANG KEUANGAN Pengawasan Anggaran Pengawasan Akuntansi Pengawasan Perbendaharaan Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah Pengawasan Pendapatan	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	

I. KEPEGAWAIAN (800)

800	Kebijakan Kepegawaian, meliputi: a. perencanaan; b. penelitian;	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
	c. statistik	Biasa/Terbuka	Pengguna	Tidak memiliki	Badan Kepegawaian dan

				dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Pengembangan SDM
810	Pengadaan Pegawai, meliputi: a. Pendaftaran CPNS (<i>testing, screening</i> , pengumuman tes dan pemanggilan, pengujian kesehatan, pengangkatan CPNS golongan I-III) b. Pendaftaran tenaga kontrak kerja/mitra kerja	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Sub Bagian umum pada Perangkat Daerah; 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
820	Mutasi, meliputi: a. pengangkatan CPNS b. pengangkatan PNS golongan I-III	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
820	c. pengangkatan dan pembebasan dalam jabatan struktural eselon I-IV	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
820	d. pengangkatan dan pemberhentian sementara dalam jabatan fungsional	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
820	e. kenaikan gaji berkala golongan I-IV	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; 2. Sekretariat/Bagian	

				mempunyai hak akses	Daerah	Umum/Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
820	f. kenaikan pangkat golongan I-IV g. pemindahan/pelimpahan/pembantuan golongan I-IV h. lolos butuh i. data sering dan penempatan kembali j. Wajib militer	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
830	Kedudukan, meliputi: a. peninjauan masa kerja	Biasa/Terbuka		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
	b. penyesuaian pangkat/gaji golongan I-IV	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
830	c. penghargaan ijazah (pencantuman gelar)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	

840	Kesejahteraan Pegawai, meliputi: a. tunjangan (struktural/fungsional); b. kehormatan; c. tambahan penghasilan; d. taspen, askes, BPJS, bantuan pendidikan, perumahan; dan e. surat dispensasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
850	Cuti, meliputi: a. tahunan; b. besar; c. sakit; d. bersalin; e. alasan penting; dan f. di luar tanggungan negara	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Sub Bagian umum pada masing-masing Perangkat Daerah
860	Penilaian meliputi: a. penghargaan (satyalencana karya satya, kenaikan pangkat anumerta, hadiah kenaikan pangkat, pegawai teladan)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
	b. hukuman (ringan, sedang, berat)	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Sub Bagian umum pada masing-masing Perangkat Daerah

860	c. Konduite/DP3	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
860	d. Ujian e. dinas tingkat I dan III	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
860	f. penilaian kinerja (struktural dan fungsional)	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; 2. Sekretariat/Bagian Umum/ Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
860	f. rehabilitasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

860	Tata Usaha Kepegawaian, meliputi: a. formasi pegawai	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; 2. Sekretariat/Bagian Umum/ Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
870	b. Bezetting/daftar unit kepegawaian c. DUK Non-PNS tidak tetap/BLUR	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 2. Sekretariat/Bagian Umum/ Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
870	d. Sistem informasi kepegawaian (NIP, KARPEG, tanda pengenal, daftar keluarga, KARSU/KARIS, daftar riwayat pekerjaan)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; 2. Sekretariat/Bagian Umum/ Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
870	e. kewenangan administrasi kewenangan (pelimpahan wewenang, spesimen tanda tangan)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
870	f. KORPRI	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; 2. Sekretariat/Bagian

				mempunyai hak akses	Daerah	Umum/ Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
880	Pemberhentian, meliputi: a. permintaan sendiri termasuk pengunduran diri dengan hak pension golongan I-IV	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; 2. Sekretariat/Bagian Umum/ Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah	
880	b. pensiun (janda/duda, yatim piatu)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; 2. Sekretariat/Bagian Umum/ Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah	
880	c. karena meninggal	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; 2. Sekretariat/Bagian Umum/ Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah	
880	d. alasan lain, keuzuran jasmani	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	

880	e. tidak dengan hormat	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
880	f. pembekalan PNS yang akan purna dan tali asih	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
880	g. pemberhentian Pegawai Non-PNS tidak tetap/BLUD	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat/Bagian Umum/ Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
890	Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu: a. sertifikasi kompetensi; b. pengembangan perangkat pembelajaran dan tenaga pengajar; c. pengendalian mutu diklat; d. kerjasama penyelenggaraan diklat; e. karya tulis/lokakarya; f. kurikulum, silabi dan modul; dan g. metode pembelajaran (kuliah, ceramah, simposium, diskusi kuliah lapangan, kurikulum, karya tulis)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
890	Pengembangan Kompetensi Teknis:	Biasa/Terbuka	Pengguna	Tidak memiliki	Badan Kepegawaian dan

		<p>a. pengembangan kompetensi/diklat teknis umum;</p> <p>b. pengembangan kompetensi/teknis inti;</p> <p>c. pengembangan kompetensi/teknis pilihan; dan</p> <p>d. praktik lapangan/observasi lapangan</p>		<p>dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses</p>	<p>dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Pengembangan SDM</p>
890		<p>Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional:</p> <p>a. pengembangan kompetensi/diklat pembentukan jabatan fungsional;</p> <p>b. pengembangan kompetensi/diklat penjurangan jabatan fungsional;</p> <p>c. pengembangan kompetensi/diklat teknis jabatan fungsional; dan</p> <p>d. praktik/observasi lapangan</p>	<p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM</p>
890		<p>Pengembangan Kompetensi Managerial:</p> <p>a. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;</p> <p>b. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintah daerah;</p> <p>c. pendidikan dasar bagi CPNS;</p> <p>d. <i>visitasi benchmarking</i>; dan</p> <p>e. inovasi kepemimpinan.</p>	<p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM</p>

J. KEUANGAN (900)					
900	Keuangan meliputi: a. Nota Keuangan; b. APBN; dan c. APBD.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. BKAD; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
910	Anggaran, meliputi: a. keputusan tentang penunjukan pengelola keuangan Perangkat Daerah/PPKD, pemimpin dan pejabat keuangan, pejabat teknis BLUD b. DPA/DPPA/DPAL-OPD/PPKD c. anggaran kas d. Surat Penyediaan Dana (SPD)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. BKAD; 2. Sekretariat/Bagian Umum/ Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
920	Akuntansi yaitu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	BKAD
930	Perbendaharaan meliputi surat perintah pencairan dana (SP2D), surat penolakan penerbitan SP2D dan daftar penguji SP2D	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	BKAD

940	Pembinaan kebendaharaan yaitu bintek/kursus yang berkaitan dengan keuangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. BKAD; 2. Sekretariat/Bagian Umum/ Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
950	Pengelolaan kas daerah meliputi: a. laporan pemotongan IWP, taperum, PPh 21 dari gaji; b. laporan rekapitulasi penerimaan daerah; c. daftar pemotongan dan penyetoran pajak (PPN/PPh) dari instansi; d. surat tanda setoran (STS); e. laporan realisasi daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran; dan f. rekonsiliasi meliputi surat penerimaan, laporan bank	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. BKAD; 2. Sekretariat/Bagian Umum/ Sub Bagian Umum di masing-masing Perangkat Daerah
950	g. laporan mutasi penempatan deposito; h. surat perintah transfer uang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. BKAD; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah
960	Evaluasi dan Pengendalian meliputi tuntutan (ganti rugi dan perbendaharaan), evaluasi dan perubahan APBD kabupaten/kota serta pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota, edaran keuangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. BKAD; 2. Sekretariat/Bagian Umum/ Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah

960	Penjualan kendaraan dinaas melalui lelang	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. BKAD; 2. Sekretariat/Bagian Umum/ Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
961	Laporan Hasil Pemeriksaan (Inspektorat dan BPK)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. BKAD; 2. Sekretariat/Bagian Umum/ Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
970	PENDAPATAN Perimbangan keuangan Bagi hasil pajak Pajak Bumi Bangunan (PBB) Bela Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBHTB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH Pasal 21)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Badan Pendapatan Daerah; 2. Sekretariat/Bagian Umum/ Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat
	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam Migas Subsidi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengembalian dan pemanfaatan air permukaan, pajak reklame				

970	Retribusi bidang kesehatan, bidang seni budaya dan pariwisata, bidang perekonomian, perindustrian perdagangan (termasuk pasar) Retribusi bidang pertanian dan peternakan (termasuk pernotongan hewan) Retribusi bidang perhubungan, komunikasi informasi dan teknologi (termasuk trayek, kelebihan muatan, telekomunikasi, parkir, dll.) Retribusi penggunaan air bawah tanah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Badan Pendapatan Daerah; 2. Sekretariat/Bagian Umum/ Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
970	Retribusi bidang perkebunan dan kehutanan (termasuk lintas dan lelang basil hutan, flora, fauna, dll.) Retribusi bidang perikanan dan kelautan Retribusi bidang pertambangan, pemanfaatan air permukaan dan metrologi Cukai Retribusi bidang lainnya (termasuk sampah)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Badan Pendapatan Daerah; 2. Sekretariat/Bagian Umum/ Sub Bagian Umum pada masing-masing Perangkat Daerah
970	Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air Pajak Retribusi Bunga Deposito	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Badan Pendapatan Daerah; 2. Sekretariat/Bagian Umum/ Sub Bagian Umum pada masing-masing PD

970	Bunga Tabungan Penerimaan ganti rugi atas kerugian/ kehilangan kekayaan daerah (TP-TGR) sumbangan pihak ketiga (kendaraan, dealer, kayu) Penerimaan lain-lain Penerimaan kembali kredit BKK Ternak tidak layak bibit Sewa Internet Penerimaan dari dana bergulir/ <i>revolving</i> Kerja sama dengan BUMD Penerimaan DUKS	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1.Badan Pendapatan Daerah; 2.Sekretariat/Bagian Umum/ Sub Bagian Umum pada masing- masing Perangkat Daerah
970	Pengolahan data pendapatan (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) Pengembangan sistem informasi pendapatan Pengembangan potensi dan pengembangan pendapatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1.Badan Pendapatan Daerah; 2.Sekretariat/Bagian Umum/ Sub Bagian Umum pada masing- masing Perangkat Daerah

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG